LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (L.K.P.J) KEPALA DAERAH AKHIR TAHUN ANGGARAN 2006

KABUPATEN LAMONGAN

BUKU I
PENGANTAR DAN EXCUTIVE SUMMARY

TAHUN 2007

BUPATI LAMONGAN

LAPORAN

KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH AKHIR TAHUN ANGGARAN 2006

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh,

YTH. - Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan;

- Saudara Wakil Bupati Lamongan;
- Para Anggota Muspida Kabupaten Lamongan.

- Saudara Sekretaris Daerah, seluruh Pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan dan para undangan serta hadirin yang berbahagia.

Mengawali pidato saya pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya mengajak hadirin sekalian untuk memanjatkan segala puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas karunia dan limpahan rahmat, nikmat dan inayah Nya sehingga pada hari ini kita dapat hadir dan mengikuti secara seksama Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2006 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh keakraban dan kekeluargaan, Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk jalan kebenaran dari zaman jahiliah ke zaman yang rohmatan lil alamin.

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT,

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 27 ayat (2), Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah seperti yang kita laksanakan pada hari ini dan menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat, sesuai ketentuan dalam hal ini adalah melalui media yang tersedia didaerah dan dapat diakses oleh publik.

Didalam penyelenggaraan pemerintahan kita semua berharap pelayanan birokrasi dapat mengarah pada "Good Governance" yang merupakan paradigma baru kepemerintahan dialam modern, untuk menuju kearah tersebut bukan merupakan hal yang mudah seperti kita membalik tangan, untuk itu diperlukan dukungan baik moril, materiil maupun finansial dari berbagai pihak dan lapisan masyarakat.

Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya menyampaikan hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan yang merupakan representasi dari masyarakat, Saudara Anggota Muspida, seluruh jajaran staf Pemerintah Kabupaten Lamongan, para Tokoh Masyarakat, dan tentunya kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Lamongan yang secara bersama-sama telah ikut serta dalam mewujudkan Kabupaten Lamongan yang lebih baik dan maju dalam segala bidang dan kegiatan, semoga apa yang telah kita perbuat di Tahun 2006 dicatat oleh Allah SWT sebagai perbuatan ibadah berupa amalan yang baik, allahuma amin ya robbalalamin.

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT,

Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah saat ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat pada tanggal 4 Januari 2007, dimana pada ketentuan Penutup Pasal 30 diamanatkan bahwa Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan berlaku pada tanggal diundangkan, sehingga dengan demikian maka sistematika Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2006 sudah harus mengacu pada ketentuan yang diatur pada Peraturan Pemerintah tersebut.

Sistematika Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

BAB I Berupa Pendahuluan yang berisikan Dasar Hukum dan Gambaran Umum Daerah;

BAB II Berupa Kebijakan Pemerintah Daerah yang berisikan Visi dan Misi, Strategi dan Arah Kebijakan Daerah sesuai RPJMD serta Prioritas Daerah;

BAB III Berupa Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah yang berisikan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Pengelolaan

Belanja Daerah;

BAB IV Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, menjelaskan Penyelenggaraan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh daerah sesuai kondisi daerah;

BAB V Penyelenggaraan Tugas Pembantuan, baik yang diterima daerah maupun yang diberikan oleh daerah kepada desa;

BAB VI Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan diantaranya adalah Kerja Sama Antar Daerah, Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga, Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah, Pembinaan Batas Wilayah, Pencegahan dan Penanggulangan Bencana, Pengelolaan Kawasan Khusus dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan

BAB VII Penutup

Jadi pada dasarnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah disusun berdasarkan RKPD yang merupakan penjabaran tahunan RPJMD yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya, sedangkan untuk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Keuangan selengkapnya dalam hal ini Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah akan disampaikan secara tersendiri berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah selambat-lambatnya 6 (Enam) bulan setelah Tahun

Anggaran berakhir dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT,

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2006 yang dilaksanakan setiap tahun kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimaksudkan sebagai wahana laporan pelaksanaan tugas untuk penilaian dan perbaikan kinerja penyelenggaraan Pemeritahan Daerah selama satu tahun, dengan tujuan sebagai upaya meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan di daerah.

Syukur alhamdulillah pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan tahun 2006 dapat berjalan sesuai harapan, aman, terkendali dan kondusif, ini semua tidak lepas dari dukungan seluruh pimpinan dan anggota DPRD di dalam melaksanakan fungsinya.

Dalam penyajian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2006 disajikan dalam 2 (dua) buku yang merupakan bagian tidak terpisahkan antara satu dengan lainnya. Buku pertama merupakan pengantar dan Executive Summary atau ringkasan pokok kegiatan, sedangkan pada buku kedua berisikan hasil-

hasil penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Lamongan Tahun 2006 secara lebih rinci, berdasarkan program-program yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lamongan Tahun 2006-2010 yang disesuaikan dengan Peratuan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007.

Selengkapnya Laporan Keterangan Pertanggunjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran tahun 2006 adalah sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

Sebagai dasar hukum Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2006 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan LPPD Kepada Pemerintah, LKPJ Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi LPPD Kepada Masyarakat;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2006.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 02 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangungan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 – 2010;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 21 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2006.

B. GAMBARAN UMUM DAERAH

1. Kondisi Geografis Daerah

Secara geografis Kabupaten Lamongan terletak pada 6 derajat 51 menit 54 detik sampai dengan 7 derajat 23 menit 6 detik Lintang Selatan dan diantara garis bujur timur 122 derajat 4 menit 4 detik sampai 122 derajat 33 menit 12 detik. Kabupaten Lamongan memiliki luas wilayah kurang lebih 1.812,8 Km^2 atau ± 3.78 persen dari luas wilayah Propinsi Jawa Timur. Dengan panjang garis pantai sepanjang 47 Km.

Batas wilayah administratif Kabupaten Lamongan adalah : sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gresik, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Jombang dan Kabupaten Mojokerto, sebelah

Barat berbatasan dengan Kabupaten Bojonergoro dan Kabupaten Tuban.

Kondisi topografi Kabupaten Lamongan dapat ditinjau dari ketinggian wilayah di atas permukaan laut dan kelerengan lahan. Kabupaten Lamongan terdiri dari dataran rendah dan bonorowo dengan tingkat ketinggian 0 – 25 meter seluas 50,17 persen, sedangkan ketinggian 25 – 100 meter seluas 45,68 persen, selebihnya 4,15 persen berketinggian 100 meter di atas permukaan air laut.

2. Gambaran Umum Demografis

Menurut data Survey Sensus Ekonomi Nasional (Susenas) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005 Jumlah Penduduk Kabupaten Lamongan tahun 2005 sebanyak 1.261.972 jiwa, terdiri dari 646.830 jiwa perempuan dan 615.142 jiwa laki-laki. Dengan komposisi kelompok umur berdasarkan jenis kelamin laki – laki usia 0-14 tahun sebanyak 170.087 jiwa, usia 15 - 64 tahun sebanyak 407.040 jiwa dan usia di atas 65 tahun sebanyak 38.015 jiwa. Sedangkan kelompok umur perempuan usia 0 -14 tahun sebanyak 151.617 jiwa, usia 15 - 64 tahun sebanyak 436.092 jiwa dan usia di atas 65 sebanyak 59.121 jiwa, sehingga jumlah penduduk Kabupaten Lamongan secara keseluruhan berdasarkan kelompok usia 0 -14

tahun sebanyak 321.704 jiwa, usia 15-64 tahun sebanyak 843.132 jiwa, usia 65 ke atas sebanyak 97.136 jiwa.

3. Kondisi Ekonomi

Berdasarkan kondisi sumber daya alam yang ada, potensi unggulan daerah Kabupaten Lamongan di sektor pertanian khususnya nampak pada sub sektor tanaman pangan dan sub sektor perikanan. Dengan total baku lahan sawah seluas 83.213 hektar Kabupaten Lamongan pada tahun 2006 mampu memberikan kontribusi produksi gabah sebanyak 776.286 ton GKG. Kabupaten Lamongan juga merupakan penghasil nomor 5 (lima) terbesar di Jawa Timur untuk komoditi jagung.

Sedangkan untuk sub sektor perikanan, Kabupaten Lamongan mampu memberikan kontribusi sekitar 65 ribu 874 ton 984 kilogram ikan senilai kurang lebih 446 milyard rupiah. Kontribusi terbesar produksi ikan di Kabupaten Lamongan disumbangkan oleh produksi ikan air tawar (sawah tambak) dan produksi perikanan laut.

Sedangkan pada sektor industri pengolahan, keunggulan potensi sektor ini banyak ditopang oleh besarnya keberadaan Industri Rumah Tangga (IRT) dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada. Berdasarkan data tahun 2006, di Kabupaten Lamongan berkembang 13 ribu 676 unit industri non formal dan 445 unit industri formal yang kesemuanya memberikan kontribusi yang

tidak sedikit terhadap perekonomian daerah dan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Lamongan.

Sektor bangunan / kontruksi merupakan salah satu sektor unggulan daerah di Kabupaten Lamongan. Hal ini menunjukkan suatu indikasi cepatnya laju gerak pembangunan sarana prasarana di Kabupaten Lamongan, baik itu berupa gedung, jalan, jembatan, sarana irigasi dan infrastruktur lainnya seperti pelabuhan penyeberangan (ASDP), obyek wisata (WBL) dan kawasan industri (LIS) yang didukung peranan swasta / investor.

Sedangkan untuk sektor jasa, khususnya sub sektor hiburan dan rekreasi menunjukkan suatu perkembangan yang nyata /significan untuk memberikan kontribusi yang semakin meningkat terhadap perekonomian daerah Kabupaten Lamongan. Pembangunan Wisata Bahari Lamongan (WBL) nampak nyata memberikan pengaruh langsung terhadap besarnya kontribusi sub sektor ini terhadap PDRB.

Melalui pemikiran yang berwawasan luas, melalui riset peta potensi unggulan daerah baik yang bersifat internal maupun lingkungan eksternal-luar daerah, wilayah Kabupaten Lamongan mempunyai letak strategis diantara pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur yang memiliki potensi cukup besar untuk dioptimalkan dalam rangka pengembangan wilayah.

Tingkat Pertumbuhan PDRB Kabupaten Lamongan berdasarkan Nilai total PDRB ADHK (Atas Dasar Harga Konstan)

Kabupaten Lamongan pada tahun 2006 (yang masih merupakan angka estimasi/sangat sementara) adalah sebesar 4 triliun 082 milyard rupiah. Sedangkan berdasarkan atas dasar harga berlaku (ADHB), PDRB Kabupaten Lamongan mencapai 5 triliun 872 milyard rupiah atau meningkat sebesar 10,24 persen dibandingkan tahun 2005. Sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar yaitu sebesar 38,89 persen atau senilai 2 triliun 284 milyard rupiah.

Perkembangan pencapaian kemajuan perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari nilai pertumbuhan perekonomian yang dicapai tiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan pada tahun 2006 mencapai 5,11 persen. Pertumbuhan ekonomi selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan pola kecenderungan yang semakin meningkat.

BAB II

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

BAB II

KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. VISI DAN MISI KABUPATEN LAMONGAN

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perda Kabupaten Lamongan Nomor 02 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006-2010 visi Kabupaten Lamongan adalah:

"TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT LAMONGAN MELALUI PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG LEBIH BAIK DAN MAJU DENGAN DILANDASI KEBERSAMAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT"

Untuk mewujudkan visi tersebut pemerintah telah menyusun lima misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipasif dan transparan.
2. Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis dan pemberdayaan masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya dengan memanfaatkan IPTEK.

4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Dalam pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan, strategi diaktualisasikan dalam bentuk kebijakan dan program sebagai tindakan yang harus diambil oleh pemerintah. Program diartikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah.

Sedangkan arah kebijakan daerah adalah pedoman/petunjuk terhadap tindakan yang diambil Pemerintah untuk mencapai tujuan, pada bab ini di kelompokkan dalam fungsi-fungsi pemerintahan.

1. Fungsi Pelayanan Umum

Pemerintah selain mempunyai peran sebagai administrator pembangunan, pelaku pembangunan dan regulator, juga sebagai penyelenggara layanan umum (public service). Penyelenggaraan layanan yang mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat merupakan fungsi pemerintahan yang wajib dilaksanakan.

2. Fungsi Ketertiban dan Keamanan

Indonesia sebagai negara hukum bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang aman, tertib, dan tenteram. Demikian halnya dengan Pemerintah Kabupaten Lamongan, mewujudkan kehidupan yang aman, tertib, dan tenteram menjadi suatu kewajiban. Untuk mewujudkan hal tersebut Pemerintah Kabupaten telah melakukan berbagai kebijakan di bidang hukum melalui penerbitan peraturan daerah, sosialisasi, dan penegakan hukum sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

3. Fungsi Ekonomi

Performa kondisi perekonomian Lamongan terbagi dalam tiga golongan besar yakni sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier. Struktur perekonomian mengalami pergeseran dari sektor primer menuju sektor sekunder dan tersier. Namun demikian sampai dengan Tahun 2006, struktur perekonomian daerah Lamongan masih didominasi oleh sektor primer khususnya pertanian. Sedangkan dari sisi investasi, kinerja investasi yang diharapkan mampu mendukung peningkatan akselerasi perekonomian Kabupaten Lamongan relatif masih belum menunjukkan kinerja yang optimal. Realisasi investasi khususnya terjadi dibidang Pariwisata, Industri dan Perhubungan khususnya di wilayah Pantura. Realisasi pengembangan Wisata Bahari Lamongan (WBL), Lamongan Integrated Shore Base (LIS), rencana

pembangunan Pelabuhan ASDP diharapkan akan semakin meningkatkan kegiatan perekonomian dan pertumbuhan ekonomi di Lamongan.

4. Fungsi Lingkungan Hidup

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan bagian terpadu dari konsep pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan berwawasan lingkungan dilaksanakan sesuai sasaran yang hendak dicapai berkaitan dengan kelestarian lingkungan hidup.

Hal – hal berkaitan dengan lingkungan hidup yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan adalah Penyediaan dan Pengendalian Kualitas Air; Kebersihan lingkungan; Pelestarian Wilayah Pantai dan Pengendalian Banjir

5. Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum

Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten akan selalu memperhatikan ketersediaan sarana dasar pemukiman untuk terus menerus meningkatkan kebutuhan dasar masyarakat diantaranya adalah penataan kawasan lingkungan kumuh, penyediaan rumah beserta sarananya dan sarana air bersih.

6. Fungsi Kesehatan

Sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Pemerintah Kabupaten Lamongan telah menetapkan kebijakan sebagai berikut : Penyehatan lingkungan,

permukiman dan pemberantasan penyakit menular serta penanganan KLB; Peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan pemerataan pelayanan melalui pemberian bantuan pelayanan kesehatan bagi masyarakat khususnya warga miskin; Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga medis dan paramedis; dan Penambahan penyediaan jenis obat-obat generik di Puskesmas

7. Fungsi Pendidikan

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan aksesibilitas pendidikan, Pemerintah Kabupaten Lamongan telah menetapkan kebijakan sebagai berikut Peningkatan mutu tenaga pendidik dan manajemen kependidikan; Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi tenaga pendidik agar mampu mengembangkan kompetensinya serta komitmennya dalam pendidikan; Pemerataan dan perluasan kesempatan pendidikan serta penuntasan wajib belajar 9 tahun; Peningkatan mutu prasarana pendidikan dan pemenuhan penyediaan alat bantu pendidikan ; serta Peningkatan pemberdayaan organisasi kepemudaan dan keolahragaan

8. Fungsi Pariwisata dan Budaya

a. Pariwisata.

Pengembangan sektor pariwisata Pemerintah Kabupaten Lamongan telah menetapkan kebijakan sebagai berikut :

Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata dan promosi wisata ; Menggali dan mengembangkan potensi daerah berupa daya tarik wisata, pengembangan sarana dan prasarana bisnis serta peningkatan infrastruktur.

b. Budaya

Dalam rangka meningkatkan apresiasi seni dan budaya lokal Pemerintah Kabupaten Lamongan telah menetapkan kebijakan "Peningkatan mutu seni dan budaya daerah".

9. Fungsi Perlindungan Sosial

Pembangunan bidang sosial merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari berbagai masalah sosial. Masalah sosial yang sering kita hadapi saat ini adalah masalah kemiskinan, gelandangan, pengemis, anak jalanan, tuna wisma, PKL, dan tingkat pengangguran yang tinggi.

C. PRIORITAS DAERAH

Program–program pembangunan daerah di Kabupaten Lamongan dalam kurun waktu lima tahun kedepan dilaksanakan dengan Agenda prioritas adalah **Pertama** Mewujudkan pemerintahan yang bersih, demokratis dan akuntabel melalui penyelenggaraan yang aspiratif, partisipatif dan transparan; **Kedua** Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis dan pemberdayaan masyarakat; **Ketiga** Meningkatkan

Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan, Pendidikan Dan Sosial **Dasar** Lainnya Dengan Memanfaatkan IPTEK; **Keempat** **Meningkatkan** Kuantitas Dan Kualitas Sarana Dan Prasarana **Publik** Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan; **Kelima** **Meningkatkan** Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam **Kehidupan** Bernegara Dan Bermasyarakat.

Dari kelima agenda prioritas tersebut diimplementasikan menjadi 36 (tiga puluh enam) program yang kemudian didalam pelaksanaannya dijabarkan dalam bentuk kegiatan di Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing.

BAB III

KEBIJAKAN UMUM

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BAB III

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAM KEUANGAN DAERAH

Asas umum yang mendasari Pengelolaan Keuangan Daerah dimaksudkan agar dalam pengelolaan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perndang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Didalam pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang transparan yang diwujudkan dalam APBD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Secara kuantitatif pendapatan Tahun Anggaran 2006 terealisasi 661 milyard 142 juta 389 ribu 197 rupiah 70 sen atau tercapai 103,19 persen dari target anggaran setelah perubahan APBD, yang terbagi dalam pendapatan asli daerah sebesar 42 milyard 441 juta 553 ribu 192 rupiah 83 sen, dan dana perimbangan sebesar 609 milyard 802 juta 181 ribu 824 rupiah 87 sen dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar 8 milyard 898 juta 654 ribu 180 rupiah.

Sedangkan pada sisi belanja mencapai 622 milyard 917 juta 166 ribu 104 rupiah 90 sen atau mencapai 93,26 persen dari target anggaran setelah perubahan APBD. Pada realisasi belanja Tahun Anggaran 2006 terbagi atas belanja aparatur daerah sebesar 125 milyard 871 juta 277 ribu 188 rupiah 90 sen, belanja pelayanan publik 497 milyard 45 juta 888 ribu 916 rupiah

Dengan demikian dalam pengelolaan keuangan daerah pada Tahun Anggaran 2006 terdapat surplus sebesar 38 milyard 225 juta 223 ribu 92 rupiah 80 sen.

Selanjutnya pada anggaran pembiayaan untuk jumlah penerimaan daerah sebesar 35 milyard 849 juta 457 ribu 947 rupiah 68 sen, sedangkan pada pos pengeluaran daerah sebesar 74 milyard 74 juta 681 ribu 40 rupiah 48 sen, dimana didalamnya terdapat sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan sebesar 66 milyard 612 juta 358 ribu 5 rupiah 11 sen, sebagaimana ketentuan berlaku akan dimasukkan pada APBD tahun anggaran berikutnya.

Namun demikian apa yang saya laporkan dalam bab ini hanyalah merupakan garis besar kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah, sedangkan secara lebih rinci dan detail akan disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD yang secara khusus penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD, karena saat ini masih dalam pelaksanaan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur.

BAB IV
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, maka penyelenggaraan urusan desentralisasi pemerintahan daerah mencakup urusan wajib dan urusan pilihan.

Urusan wajib dan pilihan penyelenggaraan pemerintahan daerah selanjutnya diimplementasikan dalam bentuk program-program yang terukur dengan berpedoman pada permendagri 13 tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2007 dimaksud, sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

A. URUSAN WAJIB

Urusan wajib yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Lamongan pada Tahun Anggaran 2006 adalah :

1. Urusan Pendidikan

Dalam rangka mengemban tugas mencerdaskan kehidupan bangsa, Pemerintah Kabupaten Lamongan senantiasa berusaha agar setiap warga mendapatkan pelayanan pendidikan yang sama tanpa mengenal latar belakang.

Sebagai perwujudan dalam memenuhi harapan tersebut, Pemerintah Kabupaten Lamongan pada Tahun anggaran 2006 melaksanakan program-program sebagai berikut : Program Pendidikan Anak Usia Dini ; Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) Tahun ; Program Kesetaraan, Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa ; Program Pendidikan Menengah; Program Pendidikan Non Formal; Program Pendidikan Luar Biasa; Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan ;

Capaian kinerja angka kelulusan siswa tingkat SD/MI/SDLB berdasarkan target RPJMD sebesar 100 persen, yaitu lulus sebanyak 22.424 siswa dari jumlah peserta ujian sebanyak 22.427 siswa, hal ini berarti mendekati target tahun 2006 sebesar 100 persen. Tingkat SLTP/MTS target RPJMD sebesar 99,63 persen, yaitu lulus sebanyak 20.376 siswa dari jumlah peserta ujian sebanyak 20.452 siswa atau tercapai 99,63 persen, hal ini berarti melebihi target RPJMD Tahun 2006. Tingkat SMA/MA berdasarkan target RPJMD sebesar 99,21 persen, yaitu sebanyak.11.445 siswa dari jumlah peserta ujian sebanyak 11.482 siswa, berarti mencapai 99,68 persen, hal ini berarti juga melebihi target RPJMD ; Peningkatan capaian kinerja tersebut tidak terlepas adanya peningkatan sarana-prasarana Gedung sekolah mulai dari tingkat Pendidikan Dasar 9 Tahun Sampai dengan Pendidikan Menengah serta Perbaikan produktifitas tenaga pendidik.

Capaian kinerja angka partisipasi murni (APM) SD/MI 113.646 anak usia SD, 113.510 siswa yang sekolah atau 99,88 persen sesuai dengan target RPJMD sebesar 99,88 persen, SLTP/MTS 57.311 anak usia SLTP, 48.535 siswa yang sekolah atau mencapai 84,69 persen, hal ini melebihi target RPJMD sebesar 76,25 persen, SMA/MA 56.590 anak usia SLTA, 30.161 siswa yang sekolah atau mencapai 53,30 persen, hal ini berarti diatas target RPJMD yang ditetapkan sebesar 46,26 persen ; sedangkan Angka melek huruf (IPM) / buta aksara yang tertangani pada tahun 2006 sebanyak 3.060 orang dari target RPJMD sebesar 2.867 orang. Sisanya sebanyak 6.467 orang akan ditangani secara bertahap mulai tahun 2007.

Permasalahan yang dihadapi pada urusan pendidikan diantaranya adalah produktifitas SDM Pendidik belum optimal, Rendahnya penerapan teknologi pendidikan dan masih adanya Ruang Sekolah yang harus diperbaiki dalam kegiatan proses belajar mengajar. Sedangkan upaya menyelesaikan kendala tersebut adalah dengan melakukan pelatihan-pelatihan bagi tenaga-tenaga pendidik dengan menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi ITS, UNAIR, UNEJ, Universitas Trunojoyo, STAIN, UNM, UIN Malang dan UNESA, Mengoptimalkan pemanfaatan ruang yang tersedia melalui swadaya Sekolah.

2. Urusan Kesehatan

Pembangunan kesehatan memiliki arti yang sangat strategis, mengingat bidang ini sangat berkaitan langsung

dengan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan kesehatan juga bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi seluruh masyarakat. Oleh sebab itu Penanganan di bidang ini dilakukan melalui lintas sektor dan melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Guna menunjang urusan tersebut, Program-program yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Lamongan pada Tahun Anggaran 2006 adalah sebagai berikut : Program Obat dan Perbekalan Kesehatan ; Program Upaya Kesehatan Masyarakat ; Program Pengawasan Obat Dan Makanan ; Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat ; Program Perbaikan Gizi Masyarakat ; Program Pengembangan Lingkungan Sehat; Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular ; Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan ; Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya ; Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata ; Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak.

Capaian kinerja persentasi balita dengan gizi buruk target RPJMD sebesar 0,85 persen tercapai 0,84 persen ; persentasi kecamatan bebas rawan gizi target RPJMD sebesar 14,29 persen tercapai 11,00 persen ; persentasi pervalensi GAKY target RPJMD sebesar 10,60 persen tercapai 10,52

persen ; angka kematian bayi perinatal (0-7 hr) per 1000 kelahiran hidup target RPJMD sebesar 3,90 permil tercapai 2,15 permil; angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup target RPJMD sebesar 92 orang perseratus ribu tercapai 71,93 orang perseratus ribu ; angka penyembuhan TB Paru target RPJMD sebesar 72 orang tertangani 82 orang, sedangkan penyembuhan DBD per 100.000 penduduk target RPJMD 20 orang tertangani 22 orang.

Capaian kinerja persentase penduduk yang memanfaatkan Puskesmas dan Rumah Sakit target RPJMD sebesar 53,51 persen tercapai 57,56 persen ; Persentasi KLB yang ditangani sebesar 100 persen ; Persentasi penduduk miskin yang terjangkau dalam jaring pengaman Kesehatan Masyarakat sebesar 100 persen sesuai target RPJMD ;

Capaian kinerja persentase Rumah tangga sehat target RPJMD sebesar 40,00 persen, terealisasi 40,00 persen; persentase tempat-tempat umum sehat target RPJMD sebesar 75,00 persen baru tercapai 55 persen ; Pasangan Usia Subur yang menjadi peserta KB aktif target RPJMD sebesar 79,15 persen tercapai 80,40 persen.

Capaian kinerja persentase pelayanan kesehatan yang memiliki sarana sesuai standar target RPJMD sebesar 84,29 persen terealisasi 85,00 persen ;

Persentase sarana kesehatan yang beroperasi sesuai dengan standar target RPJMD sebesar 100 persen tercapai 100 persen ; Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup target RPJMD sebesar 92 per 100 ribu kelahiran hidup tercapai 71,93 per 100 ribu kelahiran hidup ; Rasio tenaga dokter (idealnya 1 : 30.000) kondisi saat ini sebanyak 1 berbanding 25.383 ; Rasio tenaga bidan (idealnya 1 : 5.000) kondisi saat ini sebanyak 1 berbanding 3.026 orang; Rasio tenaga perawat (idealnya 1 : 5.000) kondisi saat ini sebanyak 1 berbanding 5.015 orang; persentase tenaga medis yang memenuhi syarat sebesar 84,46 persen telah sesuai target RPJMD ; Persentase penyediaan obat esensial generik di sarana kesehatan Pemerintah bardasarkan target RPJMD sebesar 44,38 persen baru terealisasi sebesar 20,00 persen; Persentase Rumah Sakit yang menyediakan 4 (empat) layanan kesehatan spesialis dasar target RPJMD sebesar 100 persen baru terealisasi 75,00 persen. Belum tercapainya penyediaan obat esensial generik di sarana kesehatan Pemerintah disebabkan pengadaan obat banyak digunakan untuk pembelian obat kesehatan gigi yang tidak ada kemasan generiknya, sedangkan belum terpenuhinya persentase Rumah Sakit yang menyediakan 4 (empat) layanan spesialis karena masih terdapat 1 (satu) rumah sakit swasta yang belum melayani secara lengkap layanan kesehatan spesialis dasar.

3. Urusan Lingkungan Hidup

Keseimbangan lingkungan hidup sudah sepatutnya dipertahankan dan dilestarikan, mengingat banyak terjadinya bencana dan kerusakan alam akhir-akhir ini. Daya dukung dan Keanekaragaman sumber daya alam yang tersedia menjadi potensi sekaligus tantangan bagi kemajuan Kabupaten Lamongan dimasa-masa sekarang dan akan datang

Dalam rangka mengupayakan kelestarian sumber daya alam tersebut, program-program yang dilaksanakan adalah : Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan ; Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup ; Program Perlindungan dan Konservasi Budaya Alam ; Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam; dan Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) ;

Capaian kinerja persentase jumlah hari dengan kualitas udara baik dalam setahun sebesar 100 persen, persentase peningkatan rata-rata baku mutu kualitas (kadar pH dan DO) air sungai dan air tanah di Lamongan sebesar 100 persen, persentase peningkatan kelestarian pesisir pantai sebesar 61,75 persen ; persentase penurunan luas areal lahan kritis sebesar 21,26 persen telah dilaksanakan sesuai target yang telah ditetapkan RPJMD.

4. Urusan Pekerjaan Umum

Penataan dan pembangunan fasilitas umum sarana prasarana jalan, jembatan, irigasi, pemukiman serta infrastruktur lainnya menjadi kebutuhan yang amat vital bagi masyarakat guna mendukung kelancaran roda perekonomian masyarakat menuju kemakmuran dan kesejahteraan.

Upaya-upaya peningkatan pembangunan sarana prasarana fasilitas umum tersebut diwujudkan di Kabupaten Lamongan pada Tahun 2006 melalui program-program sebagai berikut : Program Pembangunan Jalan dan Jembatan ; Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong ; Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong ; Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan ; Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan ; Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya ; Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan.

Capaian kinerja persentase peningkatan rasio jalan baik target kinerja berdasarkan RPJMD sebesar 80 persen baru tercapai 71,57, persentase peningkatan jembatan yang baik target kinerja berdasarkan RPJMD sebesar 57,63 persen terealisasi 57,63 persen, persentase ketersediaan sumber air baku berdasarkan target kinerja RPJMD sebesar 65,38 persen terealisasi 66,34 persen, persentase ketersediaan saluran irigasi berdasarkan target kinerja RPJMD sebesar 91,50 persen

terealisasi 91,24 persen, persentase saluran irigasi berkondisi baik berdasarkan target kinerja RPJMD sebesar 53,00 persen terealisasi 51,36 persen, persentase peningkatan pelayanaan air bersih berdasarkan target kinerja RPJMD sebesar 35,28 persen terealisasi 33,20 persen, peresentase terpenuhinya kebutuhan jalan lingkungan berdasarkan target kinerja RPJMD sebesar 35 persen terealisasi 74,61 persen, persentase ketersediaan drainase berdasarkan target kinerja RPJMD sebesar 35,00 persen terealisasi 41,26 persen, persentase ketersediaan Penerangan Jalan Umum (PJU) berdasarkan target kinerja RPJMD sebesar 99,75 persen tercapai 112,69 persen. Kondisi panjang jalan baik belum mencukupi target RPJMD disebabkan pada jalan utama Kabupaten diprioritaskan pada pelebaran badan jalan sehingga lebih memberikan kenyamanan pada pemakai jalan yang semakin hari semakin meningkat jumlahnya, sedangkan belum tercapainya persentase panjang saluran irigasi kondisi baik akan menjadi perhatian pada pelaksanaan pembangunan tahun anggaran berikutnya.

5. Urusan Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan diarahkan pada terwujudnya perencanaan pembangunan yang partisipatif, aspiratif dan akuntabel. Hal ini dapat terlaksana apabila perencanaan pembangunan dilandasi prinsip-prinsip mekanisme perencanaa pembangunan yang telah diatur dalam

Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2006 dan Peraturan Bupati Nomor 04 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan dan pedoman pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan.

Dalam mewujudkan keinginan tersebut maka Pemerintah Kabupaten Lamongan pada Tahun anggaran 2006 melaksanakan Program sebagai berikut : Program Pengembangan Data / Informasi, Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi.

Capaian kinerja persentase dokumen penelitian yang ditindaklanjuti sebesar 50 persen; dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu sebesar 80 persen, meningkatnya pengendalian dan evaluasi pembangunan sebesar 80 persen, serta kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan waktu dan mutu yang direncanakan sebesar 100 persen, secara keseluruhan telah dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD.

6. Urusan Perumahan

Perumahan yang pada dasarnya adalah kewajiban masyarakat sendiri dalam rangka mengupayakannya, dimana peran pemerintah adalah mendukung dan memfasilitasi terwujudnya perumahan melalui penciptaan iklim yang memungkinkan masyarakat mandiri dalam memenuhi kebutuhan perumahan.

Pemerintah Kabupaten Lamongan sangat serius terkait perumahan tersebut, hal ini ditunjukkan dengan program dan kegiatan yang dicanangkan, yakni Program Pengembangan Perumahan dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat berdasarkan program Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat yaitu Program Gerakan Sejuta Rumah, telah terbangun 552 unit rumah di Graha Indah. Sedangkan pembangunan perumahan yang dilaksanakan oleh pihak developer swasta yang berkembang di Lamongan meliputi Demangan Regency, LA Regency dan Kusuma Bangsa Regency.

7. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Pemuda merupakan harapan bangsa, segala potensi dan kreatifitasnya perlu dipacu terus menerus agar terbina generasi yang tangguh dan mandiri serta siap berprestasi baik ditingkat nasional maupun internasional.

Dalam rangka menempuh keberhasilan pemuda tersebut maka Pemerintah Kabupaten Lamongan pada Tahun 2006 menentukan program sebagai berikut : Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan; Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga; Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga.

Capaian kinerja meningkatnya organisasi kepemudaan yang di lakukan pembinaan dari target RPJMD sebesar 100 persen telah terealisasi sebesar 100 persen.

8. Urusan Penanaman Modal

Dalam memasuki era globalisasi, kita dituntut untuk lebih kompetitif guna menyongsong perdagangan bebas. Termasuk didalamnya kegiatan dibidang investasi yang memiliki tingkat persaingan yang ketat. Menghadapi hal tersebut Pemerintah Daerah berbenah melakukan regulasi melalui kebijakan baru yang intinya diharapkan pertumbuhan investasi dapat meningkat secara signifikan sehingga dapat menyerap tenaga kerja yang lebih besar.

Dalam rangka menempuh keberhasilan Penanaman Modal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Lamongan pada Tahun 2006 menentukan program dan kegiatan adalah sebagai berikut : Program Peningkatan promosi dan kerjasama investasi ; Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi.

Capaian kinerja persentase Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi dari target RPJMD sebesar 2,78 persen telah terealisasi sesuai dengan target RPJMD.

Untuk kawasan khusus yang juga merupakan bagian dari Urusan Penanaman Modal, persentase penyelesaian pembangunan Lamongan Integrated Shorebase (LIS) dari

target RPJMD sebesar 25 persen terealisasi sebesar 50 persen; persentase terpenuhinya sarana penunjang zona kawasan Wisata Bahari Lamongan (WBL) dari target RPJMD sebesar 90 persen terealisasi sebesar 100 persen; persentase penyelesaian pembangunan dermaga penyeberangan antar pulau (ASDP) dari target RPJMD sebesar 50 persen terealisasi sebesar 50 persen.

9. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Sebagai salah satu unsur lembaga ekonomi masyarakat yang memiliki spektrum luas dan akses pemberdayaan terhadap masyarakat pedesaan, maka Koperasi di daerah dituntut untuk melaksanakan restrukturisasi dan revitalisasi sebagai perwujudan peran serta dalam pembangunan ekonomi daerah dengan menggali dan mengoptimalkan potensi daerah.

Dalam rangka menempuh keberhasilan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah maka Pemerintah Kabupaten Lamongan pada Tahun 2006 menentukan program dan kegiatan sebagai berikut : Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah, Program Pengembangan Sistim Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah ; dan Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.

Capaian kinerja persentase koperasi dengan skor baik target RPJMD sebesar 43,00 persen terealisasi sebesar 43,43 persen; persentase Usaha Mikro Kecil dan Menengah tangguh

(UMKM) target RPJMD sebesar 0,28 persen terelisasi sebesar 0,29 persen; persentase Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mandiri target RPJMD sebesar 0,06 persen terealisasi sebesar 0,07 persen.

10. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Penataan Kependudukan dan Catatan Sipil bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan kependudukan masyarakat sehingga penyelesaian dokumen kependudukan warga Kabupaten dapat dilaksanakan dengan biaya yang murah dan dalam tempo yang singkat.

Dalam rangka mewujudkan Penataan Administrasi Kependudukan tersebut maka program-program yang dilaksanakan di Kabupaten Lamongan Tahun 2006 adalah Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah Pemasangan Komputer Layanan Kependudukan; Penyuluhan Akta-akta catatan sipil dan administrasi kependudukan; dan Konsultasi dan Sertifikasi ISO – 9001 : 2000

Capaian kinerja persentase Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) hari dari target RPJMD sebesar 100 persen terealisasi sebesar 103,3 persen; persentase akte kelahiran yang diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) hari dari target RPJMD sebesar 100 persen terealisasi sebesar 142,40 persen; persentase penduduk yang ber KTP dari target RPJMD sebesar 69,50

persen terealisasi sebesar 86,03 persen; persentase penduduk ber Akte dari target RPJMD sebesar 40,72 persen terealisasi sebesar 40,80 persen dan tingkat pertumbuhan pendidikan berdasarkan data terakhir BPS mencpai 0,97 persen

11. Urusan Ketenagakerjaan

Urusan Tenaga Kerja bertujuan untuk memberikan peningkatan kapasitas Sumberdaya Manusia Pencari Kerja dan memberikan perlindungan terhadap pencari kerja. Adapun program dalam mencapai tujuan dari urusan tenaga kerja adalah : Program Peningkatan Kualitas Dan Produktifitas Tenaga Kerja ; Program Peningkatan Kesempatan Kerja ; Program Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenaga Kerjaan.

Capaian kinerja meningkatnya partisipasi angkatan kerja dari target RPJMD sebesar 84,5 persen terealisasi sebesar 95,76 persen, penurunan angka kecelakaan kerja dari target RPJMD sebesar 15,38 persen terealisasi sebesar 96,15 persen, persentase perusahaan yang menerapkan Upah Minimum Regional (UMR) dari target RPJMD sebesar 100 persen terealisasi sebesar 133,11 persen.

12. Urusan Ketahanan Pangan

Usaha peningkatan produksi dan produktiftas yang dilakukan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan yang berorientasi pada keterkaitan antara sub sistem usaha tani,

penyediaan sarana dan prasarana, pengolahan dan pemasaran hasil produk, guna mendapatkan nilai tambah untuk meningkatkan pendapatan petani dan terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat.

Untuk mendukung dan mengupayakan program ketahanan pangan, maka Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 mewujudkan dengan Program Peningkatan Ketahanan Pangan yang tingkat keberhasilannya dapat ditinjau dari besarnya capaian peningkatan produksi tanaman pangan khususnya padi dan jagung. Keberhasilan capaian tersebut akan semakin mengukuhkan Kabupaten Lamongan sebagai lumbung pangan utama di Jawa Timur.

Capaian kinerja peningkatan produksi tanaman pangan terdiri dari padi dengan target RPJMD sebesar 1,30 persen terealisasi sebesar 9,82 persen atau 8,52 persen di atas target; jagung target RPJMD sebesar 0,68 persen terealisasi sebesar 21,35 persen atau 20,67 persen diatas target; kedelai dengan target sebesar 4,00 persen terealisasi minus 1,44 persen atau 5,44 persen dibawah target RPJMD; kacang hijau dengan target sebesar 10,10 persen terealisasi minus 0,44 persen atau 10,54 persen dibawah target RPJMD.

Sedangkan untuk capaian kinerja peningkatan produktivitas tanaman pangan terdiri dari : padi dengan target RPJMD sebesar 1,00 persen terealisasi 3,70 persen; jagung target RPJMD sebesar 1,00 persen terealisasi 20,83 persen

atau 19,83 persen diatas target RPJMD; kedelai dengan target sebesar 2,50 persen terealisasi minus atau mengalami penurunan produktivitas sebesar 3,99 persen; sedangkan kacang hijau dengan target RPJMD sebesar 8,00 persen terealisasi sebesar 7,40 persen.

Tercapainya target peningkatan produksi dan produktifitas khususnya pada padi dan jagung disebabkan oleh (1) Keberhasilan pelaksanaan program atau kegiatan yang dilaksanakan melalui Peningkatan Mutu Intensifikasi (PMI) dan penggunaan benih unggul dan hibrida, (2) Besarnya minat petani selama musim tanam 2005/2006 untuk budidaya padi dan jagung serta didukung oleh harga jual yang relatif baik dan stabil. Sedangkan penurunan produksi dan produktifitas khususnya pada kedelai dan kacang hijau disebabkan oleh adanya penurunan capaian luas areal tanam sebagai akibat banyaknya para petani selama musim tanam tahun 2005/2006 beralih untuk budidaya tanaman yang lebih menguntungkan khususnya jagung, padi dan tembakau virginia.

13. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) diarahkan pada semua lapisan masyarakat tanpa membedakan perbedaan gender, sehingga peningkatan kualitas manusia lebih terfokus dan merata. Namun secara realitas yang terjadi, kaum perempuan masih tertinggal sehingga rentan terhadap segala permasalahan yang terus berkembang di masyarakat.

Program-program yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Lamongan pada Tahun Anggaran 2006 adalah sebagai berikut : Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak serta Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.

Capaian kinerja peningkatan peran kader wanita pembangunan atau peningkatan lembaga di bidang pemberdayaan perempuan sebesar 20 persen telah dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan.

14. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang lebih baik dan maju, akan lebih mudah apabila laju pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan selaras dengan pertumbuhan perekonomian dan peningkatan pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan sosial lainnya, hal tersebut perlu diupayakan terus menerus sehingga dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat dari yang terkecil yaitu keluarga dengan norma keluarga kecil bahagia sejahtera yang selanjutnya meningkat menjadi keluarga berkualitas.

Program-program yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Lamongan pada Tahun Anggaran 2006 adalah sebagai berikut : Program Keluarga Berencana ; Program Pelayanan Kontrasepsi ; Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB / Keluarga Yang Mandiri ;

Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi Dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat.

Capaian kinerja penurunan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial; persentase penurunan jumlah penduduk miskin; persentase warga miskin yang meningkat pendapatannya; persentase warga miskin yang meningkat kualitas hidup, permukiman dan perumahannya secara umum telah diupayakan melalui beberapa kegiatan pemberdayaan masyarakat, perbaikan lingkungan perumahan dan pemberian bantuan modal kerja dengan sistem bergulir.

15. Urusan Perhubungan

Bidang perhubungan memiliki peran yang sangat strategis dalam kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan serta diarahkan pada terwujudnya sistem transportasi nasional yang andal, berkemampuan tinggi dan diselenggarakan secara terpadu, tertib, lancar, aman, nyaman dan efesien dalam menunjang serta menggerakkan dinamika pembangunan dan perekonomian bangsa.

Untuk mendukung dan mengupayakan sistem transportasi tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 mewujudkan dengan program sebagai berikut : Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan; Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan; Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas.

Capaian kinerja persentase ketersediaan sarana komuter dari Lamongan - Gresik - Surabaya dari target RPJMD sebesar 50 persen terealisasi sesuai dengan target; persentase peningkatan penyelesaian pelabuhan khusus perikanan nusantara dari target RPJMD sebesar 50 persen terealisasi sebesar 60 persen; persentase penyelesaian pelabuhan umum Sedayu Lawas sebesar 60 persen; persentase penyelesaian terminal terpadu di kawasan ASDP dari target RPJMD sebesar 50 persen baru terealisasi 40 persen; persentase peningkatan ketersediaan rambu-rambu lalu lintas dari target RPJMD sebesar 50 persen terealisasi 52,4 persen; persentase ketersediaan marka jalan dari target RPJMD sebesar 60 persen teralisasi sebesar 100 persen; persentase peningkatan kendaraan yang telah uji Kir dari target RPJMD sebesar 91,99 persen teralisasi sebesar 97,2 persen; persentase peningkatan kapal yang telah memiliki Pas Kecil dan Sertifikasi Kelayakan Kapal (SKK) dari target RPJMD sebesar 38 persen baru terealisasi sebesar 9,2 persen; persentase peningkatan kapal yang telah beregister dari target RPJMD sebesar 80 persen terealisasi sesuai dengan target. Belum terpenuhinya target kapal yang memiliki Pas Kecil dan Sertifikasi Kelayakan Kapal (SKK) hal ini dikarenakan masih kurangnya kesadaran nelayan khususnya pemilik kapal.

16. Urusan komunikasi dan Informatika

Pada era sekarang ini, dinamika masyarakat mengalami perubahan yang sangat cepat, menuntut teknologi komunikasi dan informasi yang canggih dan up to date serta dapat diakses secara luas oleh masyarakat.

Upaya perbaikan Teknologi Informasi di Kabupaten Lamongan tersebut terus menerus dilakukan, hal ini diwujudkan dengan program sebagai berikut : Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa ; Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media.

Capaian kinerja persentase layanan publik menggunakan Teknologi Informasi (IT) melebihi target yang telah ditetapkan RPJMD karena adanya bantuan pembangunan telecenter di Desa Drajat Kecamatan Paciran; persentase peningkatan jumlah pengunjung situs resmi Pemkab Lamongan target RPJMD sebanyak 20 persen setiap tahunnya meningkat sampai dengan 50 persen hal ini karena adanya up-date data yang selalu dilakukan.

17. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Dalam rangka menciptakan stabilitas keamanan yang kondusif dan untuk menekan terjadinya rawan konflik di daerah khususnya di Kabupaten Lamongan, program-program yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Lamongan pada Tahun Anggaran 2006 adalah sebagai berikut : Program Peningkatan

Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan ; Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal ; Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan ; Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan ; Program Pendidikan Politik Masyarakat ; Program Pencegahan dini dan Penanggulangan Bencana Alam.

Capaian kinerja dengan meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah hal ini karena adanya peningkatan tindakan preventif education dan tindakan represif yang dilaksanakan aparatur penegak hukum, persentase organisasi masyarakat, orpol, pemuda dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang di bina dan persentase keputusan publik tentang penyelesaian sosial kemasyarakatan yang melibatkan masyarakat telah tercapai sesuai target sehingga dapat menurunkan angka persentase daerah rawan konflik .

18. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian.

Otonomi daerah selain memberikan keleluasaan pada penataan kelembagaan dan struktur organisasi pemerintahan daerah yang mengarah pada good governance yang merupakan paradigma baru kepemerintahan di alam modern. Selanjutnya pada administrasi keuangan daerah dimaksudkan agar dalam hal pengelolaan keuangan dapat dikelola secara

tertib, efesien, ekonomis, efektif dan bertanggungjawab. Disamping itu perlu ditunjang adanya perangkat daerah dan aparatur yang profesional sesuai bidang tugas masing-masing, untuk menuju kearah tersebut maka fungsi pengawasan melekat, pengawasan internal, dan pengawasan eksternal secara terpadu diharapkan dapat dilaksanakan secara optimal.

Dalam rangka mewujudkan keinginan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Lamongan pada Tahun 2006 melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut : Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah ; Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah ; Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten ; Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Kepala Daerah; Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan Aparatur pengawasan ; Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi ; Program penataan peraturan perundang-undangan ; Program pendidikan kedinasan; Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur; Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.

Capaian kinerja persentase SKPD yang analisa jabatan dan ketetalaksanaan telah dilaksanakan, persentase SKPD pengelola arsip bernilai historis tinggi dan vital yang telah mengadminitrasi dengan baik dan Persentase SKPD yang

menyampaikan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ), persentase Raperda yang diajukan ke DPRD telah dilaksanakan sesuai indikator target kinerja yang telah ditetapkan RPJMD, meningkatnya instansi pelayanan yang memperoleh ISO sebanyak dua SKPD, Persentase SKPD yang memiliki Standar Pelayanan Minimal sebanyak 18 SKPD, Rata-rata tenggang waktu penyelesaian IMB sebesar 93 persen, Rata-rata tenggang waktu penyelesaian SIUP sebesar 96,80 persen, Persentase penurunan kasus pelanggaran hukum oleh aparatur; persentase tindaklanjut hasil pemerikasaan APIP.

Capaian kinerja jumlah pengiriman mengikutkan Pegawai untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan struktural dari target RPJMD sebesar 100 persen dan telah terealisasi sebesar 100 persen.

19. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dalam pembangunan daerah secara garis besar ditujukan untuk mewujudkan tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan suatu terobosan dalam menggali potensi-potensi baru yang dapat menimbulkan multiplier efect pertumbuhan ekonomi dengan pemberdayaan masyarakat.

Program-program yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Lamongan pada Tahun Anggaran 2006 adalah Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan; Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam

Membangun Desa; dan Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan.

Secara umum pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat baik didalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pemerintahan dan pembangunan telah dilaksanakan seiring dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat khususnya ditingkat pedesaan.

20. Urusan Sosial

Pembangunan bidang sosial merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari berbagai masalah sosial. Permasalahan yang sering kita hadapi adalah masalah kemiskinan, gelandangan dan tingkat penganggran yang tinggi. Kondisi tersebut merupakan masalah sosial yang harus segera diatasi agar tidak berkembang semakin kompleks.

Program-program yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Lamongan pada Tahun Anggaran 2006 adalah sebagai berikut : Program Pemberdayaan Fakir Miskin, dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya,Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial ; Program Pembinaan Anak Terlantar ; Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma ; Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Kegiatan yang dilaksanakan dalam pelaksanaan urusan sosial dilakukan secara terkoordinasi sesama dinas instansi terkait baik yang ada di tingkat Kabupaten maupun tingkat Propinsi secara bersama-sama.

21. Urusan Kebudayaan

Dengan adanya globalisasi berdampak pada perubahan budaya masyarakat. Pengembangan kebudayaan diharapkan dapat memberikan arah bagi perwujudan identitas yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa.

Program-program yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Lamongan pada Tahun Anggaran 2006 adalah sebagai berikut : Program Pengembangan Nilai Budaya ; Program Pengelolaan Kekayaan Budaya ; Program Pengelolaan Keragaman Budaya ;

Capaian kinerja persentase cagar budaya yang dilindungi, Peningkaatan Kelompok Seni dan Budaya yang berprestasi; Peningkatan Kelompok Seni dan Budaya yang di bina telah dilaksanakan oleh SKPD sesuai tupoksi masing-masing SKPD sesuai target RPJMD, hanya yang saat ini masih menjadi perhatian kita bersama adalah rencana pembangunan gedung kesenian Lamongan.

22. Urusan Statistik

Dalam era globalisasi sekarang ini, data statistik menjadi kebutuhan utama sebagai bahan perencanaan dan evaluasi

terhadap hasil-hasil pembangunan. Maka penyajian data statistik perlu ditingkatkan baik kwantitas maupun kualitasnya.

Dalam rangka peningkatan kualitas statistik daerah, maka program-program yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Lamongan pada Tahun Anggaran 2006 adalah sebagai berikut : Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah. Sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku maka secara umum dalam penyusunan kestatistikan dasar dilakukan kerjasama dengan BPS Kabupaten Lamongan.

23. Urusan Kearsipan

Dokumen-dokumen penting dalam peyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, baik yang aktif maupun inaktif harus disimpan secara teratur dan rapi melalui tata kearsipan yang baik.

Guna menunjang tata kearsipan tersebut, maka program-program yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Lamongan pada Tahun Anggaran 2006 adalah Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah;

Capaian kinerja adalah peningkatan dokumen Statistik yang ditindaklanjuti sebesar 100 persen telah dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD. Namun demikian untuk kedepan masih diperlukan adanya kantor penyimpanan arsip yang lebih representatif.

24. Urusan Perpusatakaan

Dengan semakin berkembangnya ilmu pegetahuan dan teknologi dewasa ini keberadaan sarana perpustakaan amat dibutuhkan, terlebih bahwa semakin tingginya tingkat kesadaran masyarakat dalam budaya baca baik dikalangan terdidik/pelajar maupun masyarakat umum.

Sebagai upaya mendukung urusan perpustakaan tersebut, maka Program-program yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Lamongan pada Tahun Anggaran 2006 adalah Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan. Hal ini dapat terlihat pada tingkat pengunjung di ruang perpustakaan yang semakin hari semakin diminati khususnya bagi pelajar dan mahasiswa.

B. URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN

1. Urusan Perikanan dan Kelautan

Dengan garis pantai Kabupaten Lamongan sepanjang kurang lebih 47 kilometer serta luasan sawah tambak seluas 22.422,49 Hektar. Kabupaten Lamongan merupakan daerah yang memiliki potensi sumber daya perikanan yang cukup besar, khususnya perikanan tangkap dan perikanan budidaya.

Dalam rangka pengembangan kelautan dan perikanan, maka program-program yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2006 adalah sebagai berikut : Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir ;

Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan, Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut; Program pengembangan budidaya perikanan ;Program pengembangan perikanan tangkap; dan Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan.

Capaian kinerja peningkatan produksi untuk perikanan dan kelautan pada tahun 2006 secara umum belum dapat melampaui target sebagaimana ditetapkan RPJMD. Perikanan tangkap dengan target kenaikan produksi sebesar 0,50 persen terealisasi minus atau mengalami penurunan produksi sebesar 0,84 persen dibandingkan produksi tahun 2005; demikian juga produksi perairan umum menurun sebesar 3,81 persen, produksi sawah tambak mengalami penurunan 7,55 persen. Sedangkan produksi perikanan tambak dengan target kenaikan sebesar 0,50 persen terealisasi sesuai dengan target, yaitu naik sebesar 0,50 persen.

2. Urusan Pertanian

Dengan berkembangnya lingkungan strategis baik pada tatanan regional, nasional maupun global. Pembangunan pertanian bukan hanya ditekankan pada aspek kuantitas saja tetapi juga harus berkualitas, efisien, berdaya saing, berkelanjutan dan berkerakyatan.

Dalam rangka pengembangan pertanian, maka Program-program yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten

Lamongan Tahun Anggaran 2006 adalah sebagai berikut: Program Peningkatan Kesejahteraan Petani; Program Peningkatan Pemasaran hasil Produksi Pertanian/Perkebunan; Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan; Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan; Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan; Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak; Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.

Selain Produksi dan Produktifitas Tanaman Pangan seperti telah dijelaskan pada urusan ketahanan pangan, maka capaian kinerja peningkatan produksi tanaman perkebunan secara umum melampaui dari target RPJMD kecuali produksi kapas dan kenaf. Tembakau virginia dengan target kenaikan produksi sebesar 1,60 persen terealisasi 161,60 persen atau 160,00 persen diatas target; tembakau Jawa target RPJMD sebesar 1,60 persen terealisasi sebesar 175,49 persen atau 173,89 persen diatas target; dan tebu dengan target sebesar 1,60 persen terealisasi sebesar 31,27 persen. Untuk produksi kapas mengalami penurunan sebesar 75,44 persen dibandingkan tahun 2005, demikian juga untuk kenaf menurun sebesar 5,97 persen. Serangan hama dan penyakit kutu kebul dan kondisi lingkungan tumbuh merupakan faktor utama yang mengakibatkan penurunan produksi kapas dan kenaf. Sedangkan untuk peningkatan populasi hasil ternak baik ternak

besar, ternak kecil dan unggas masih belum dapat melampaui target yang ditetapkan RPJMD. Populasi ternak besar dengan target RPJMD naik sebesar 4,00 persen hanya terealisasi 1,17 persen; ternak kecil dengan target sebesar 2,00 persen terealisasi sebesar 0,85 persen sedangkan untuk unggas dengan target 4,00 persen terealisasi minus atau mengalami penurunan sebesar 7,33 persen dibandingkan populasi tahun 2005. Wabah flu burung menjadi faktor dominan dalam penurunan populasi unggas tersebut.

Capaian kinerja produktivitas tanaman tembakau virginia, tembakau jawa dan tebu dengan target RPJMD masing-masing sebesar 1,60 persen secara umum melampaui target yang telah ditetapkan. Tembakau virginia terealisasi sebesar 63,19 persen, tembakau jawa terealisasi 23,38 persen dan tebu terealisiasi sebesar 1,98 persen. Sedangkan untuk capaian peningkatan produktivitas kapas dan kenaf masih belum dapat memenuhi target RPJMD.

Adapun langkah-langkah yang di ambil guna meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman hortikultura dan perkebunan serta populasi ternak adalah sebagai berikut (1) Peremajaan tanaman hortikultura yang sudah tidak produktip; (2) peningkatan mutu intensifikasi (PMI) tanaman hortikultura dan perkebunan serta ternak; (3). Antisipasi dini dalam rangka penanggulangan wabah flu burung;

(4) Pengembangan bibit-bibit unggul ternak; dan (5) peningkatan pengawasan pemotongan hewan betina produktip.

3. Urusan Kehutanan

Pembangunan kehutanan yang berkelanjutan sejalan dengan kebijaksanaan otonomi daerah diperlukan pengelolaan yang komprehensip dan berorientasi pada aspek ekologis, ekonomi dan sosial sehingga mampu berperan mewujudkan kondisi sumberdaya alam dan lingkungan yang lestari.

Dalam rangka pengembangan kehutanan, maka program-program yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2006 adalah sebagai berikut: Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan; Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan; Program Pembinaan dan penertiban Industri Hasil Hutan.

Capaian kinerja peningkatan produksi hasil hutan rakyat dengan target kenaikan sebesar 0,60 persen terealisasi minus atau mengalami penurunan produksi sebesar 11,48 persen dibandingkan tahun 2005. Tidak tercapainya target tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh umur tegakan pohon hutan rakyat yang pada saat ini sebagian besar masih relatif muda sehingga masyarakat/pemilik hutan rakyat belum ekonomis untuk melakukan penebangan disisi lain tegakan hutan rakyat yang siap tebang semakin berkurang. Diyakini sekitar lima - sepuluh tahun ke depan produksi kayu hutan rakyat akan meningkat tajam seiring dengan peningkatan umur tegakan

pohon hutan rakyat yang selama ini telah dikembangkan melalui kegiatan pengembangan hutan kemasyarakatan khususnya Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL) serta Gerakan Sejuta Pohon (GSP)

4. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Sebagai sumberdaya alam yang tidak dapat pulih, pengelolaan dan eksploitasi komoditi energi dan sumber daya mineral harus memperhatikan dampak kelestarian lingkungan maupun tingkat kemanfaatan yang efisien, sehingga fungsi pengendalian dan pembinaan terhadap kegiatan eksploitasi perlu dukungan secara intens oleh semua pihak.

Program-program yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2006 adalah sebagai berikut : Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan ; Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan ; Program pembinaan dan pengawasan bidang air bawah tanah dengan capaian kinerja penurunan penyimpangan pemanfaatan lahan tambang dari target RPJMD sebesar 12 persen terealisasi sesuai target.

5. Urusan Pariwisata

Pembangunan kepariwisataan diarahkan pada peningkatan pariwisata menjadi sektor andalan yang mampu mendorong kegiatan ekonomi, termasuk pula sektor lain yang

terkait. Sehingga lapangan pekerjaan, pendapatan masyarakat dan pada akhirnya pendapatan daerah akan meningkat.

Program yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2006 adalah Program pengembangan destinasi pariwisata dengan Capaian kinerja Peningkatan PDRB Sub sektor Pariwisata sebesar 12,25 persen, atau sebesar 10 milyard 949 juta .870 ribu rupiah, meningkat dari target RPJMD sebesar 0,05 persen. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 100,5 persen atau sebanyak 411 orang, meningkat dari target RPJMD sebesar 100 persen. Sedangkan capaian kinerja untuk wisatawan nusantara terealisasi sebesar 3 persen atau sebanyak 1.520.507 orang. Peningkatan sektor pariwisata tersebut karena adanya Wisata Bahari Lamongan dan giatnya Lamongan dalam mempromosikan sektor pariwisata lainnya.

6. Urusan Industri

Mengingat arti penting industri dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, maka akan sangat berarti jika dilakukan upaya-upaya pengembangan industri usaha kecil dan menengah, meskipun tidak menutup kemungkinan akan tumbuh industri-industri besar seiring makin diminatinya wilayah Kabupaten Lamongan sebagai penanaman modal sektor industri.

Dalam rangka pengembangan industri, maka program-program yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Lamongan

Tahun Anggaran 2006 adalah sebagai berikut: Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah; Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri dengan Capaian kinerja Peningkatan PDRB sektor industri target RPJMD sebesar 0,05 persen dan terealisasi sebesar 12,89 persen atau sebesar 308 milyard 725 juta 700 ribu rupiah. Hal ini ditunjang oleh semakin menggeliatnya industri di Kabupaten Lamongan.

7. Urusan Perdagangan

Saat ini sektor perdagangan masih bersifat perdagangan domestik dan masih mengandalkan komoditi hasil pertanian. Sehingga Pemerintah Daerah berperan sebagai fasilitator dalam pengembangan jaringan usaha baik dalam skala regional maupun nasional.

Dalam rangka pengembangan perdagangan, maka program-program yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2006 adalah sebagai berikut : Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan; Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri; Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan dengan Capain kinerja Peningkatan PDRB Sub sektor Perdagangan dari target RPJMD sebesar 0,08 persen telah terealisasi sebesar 19,53 persen atau sebesar 1 triliun 878 milyard 160 juta 970 ribu rupiah. Meningkatnya sektor perdagangan tersebut menunjukkan semakin kondusifnya perdagangan di Kabupaten Lamongan.

8. Urusan Ketransmigrasian

Dengan kepadatan penduduk di Kabupaten Lamongan pada tahun 2005 sebesar 768,5 per orang/Km, bukan tidak mungkin dalam tahun-tahun mendatang tingkat kepadatan dan hunian penduduk akan semakin tinggi. Hal ini membutuhkan strategi penanganan migrasi kependudukan dan salah satu penangangan masalah tersebut adalah lewat transmigrasi.

Program yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2006 adalah Program Transmigrasi Lokal.

BAB V

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

BAB V

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau Desa dari Pemerintah Propinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa dalam rangka melaksanakan tugas tertentu. Tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Lamongan adalah melalui :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, meliputi Urusan Pendidikan, yang dilaksanakan dengan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Program Pendidikan Menengah dalam bentuk Pembangunan dan Rehabilitasi Sekolah;
2. Dinas Kesehatan dan Badan Pengelola RSUD Dr.Soegiri meliputi Urusan Kesehatan, yang dilaksanakan dengan Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya berupa Pembangunan Puskesamas Keliling serta Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur berupa Pengadaan Sepeda Motor penunjang puskesmas ;
3. Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lamongan, meliputi (a) Urusan Pertanian, (b) Urusan Ketahanan Pangan dan (c) Urusan Kehutanan, yang dilaksanakan dengan bentuk Program Peningkatan Kesejahteraan Petani; Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan; Program

Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan; Program Peningkatan Ketahanan Pangan; serta Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

4. Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan meliputi Urusan Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan dengan Program Pengembangan Budidaya Perikanan.
5. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi meliputi Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang dilaksanakan dengan Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi Urusan Sosial yang dilaksanakan dengan Program Pemberdayaan Fakir Miskin dengan kegiatan pengadaan sarana prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin dalam bentuk Program Aksi Mengatasi Dampak Kenaikan BBM dan Kemiskinan (PAM-DKB);
7. Badan Pemberdayaan Masyarakat, meliputi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dilaksanakan dengan program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan berupa Pemberdayaan Usaha; Pemberdayaan Manusia; dan Pemberdayaan Lingkungan
8. Bappeda, Dinas PU. Cipta Karya dan PU. Bina Marga, meliputi Urusan Pekerjaan Umum yang dilaksanakan melalui program Pembangunan Jalan dan Jembatan, yakni berupa peningkatan Kualitas jalan, jembatan permukiman dilingkungan kumuh (NUSSP/Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project).

9. Bappeda, Dinas PU Bina Marga, PU. Cipta Karya dan PU. Pengairan meliputi Urusan Pekerjaan Umum dengan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan; Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong; dan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya di laksananan dengan kegiatan Prakarsa Pembaharuan Tata Pemerintah Daerah (P2TPD).

BAB VI

PENYELENGGARAAN

TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

BAB VI

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. Kerjasama antar daerah yang telah dilakukan pada Tahun Anggaran 2006, **Pertama**, adalah kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan Pemerintah Kabupaten Gresik terkait dengan Pengawasan, pemanfaatan sumber daya ikan tangkap dan penanganan konflik nelayan diwilayah perairan laut kedua wilayah, maka perlu adanya pembinaan dan pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya perikanan terutama sumber daya ikan tangkap dan penanganan konflik nelayan yang rawan terjadi.

Realisasi pelaksanaan kegiatan diantaranya telah melakukan sosialisasi Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 kepada para nelayan di kecamatan paciran dan Brondong, diharapkan antar Kabupaten (Lamongan dan Gresik) ada kerjasama sehingga bila terjadi konflik antar nelayan bisa diselesaikan melalui Pos Keamanan Laut Terpadu.

Kedua, kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan Pemerintah Propinsi Jawa Timur dalam hal ini Badan Pengelola Data Elektronik Propinsi Jawa Timur berupa Pembangunan telecenter di Desa Drajat Kecamatan Paciran sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dengan menggunakan alat bantu teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

B. Kerjasama dengan Pihak Ketiga, **Pertama,** Pemerintah Kabupaten Lamongan kerjasama dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, berupa kerjasama Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang meliputi : Peningkatan, pengembangan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia ; Peningkatan, pengembangan dan pemberdayaan Sumber Daya Alam ; serta Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kedua, kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan Kamar Dagang Indonesia Daerah Jawa Timur berupa Pembangunan, Pengembangan dan Pengelolaan Pasar Induk Beras dan Pangan di Lamongan hal ini dimaksudkan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan pendapatan masyarakat

Ketiga, kerjasama dengan PT. Telkom Kandatel Surabaya Barat yang ditindaklanjuti oleh PT. Telkom Indonesia, Tbk. berupa kegiatan peningkatan informasi layanan masyarakat melalui SMS content untuk dibuka layanan SMS tentang informasi mengenai Pengurusan KTP; Perijinan; Biaya pengurusan KK dan KTP.

Keempat, kerjasama dengan PT Tawang Swasti Rawikara berupa kegiatan pengelolaan dan penempatan reklame yang ada di wilayah Kabupaten Lamongan

Kelima, kerjasama dengan Perum Prasarana Perikanan Samudra berupa kegiatan Pengelolaan Pabrik Es Balok Milik Pemerintah

Kabupaten Lamongan, diantaranya menyediakan pabrik es balok untuk memenuhi kebutuhan para nelayan.

Keenam, kerjasama dengan KUD Mina Tani Brondong dalam hal penyelenggaraan lelang ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Brondong sehingga pelayanan kepada nelayan dapat optimal.

Ketujuh, kerjasama dengan PT PLN (Persero) Distribusi Jatim Area Pelayanan dan Jaringan Gresik, Mojokerto dan Bojonegoro berupa kegiatan Pemungutan, Penyetoran Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran Rekening Listrik, untuk menjamin kelancaran penerimaan PAD yang berasal dari PPJ serta menjamin kelancaran pembayaran rekening listrik Pemerintah Daerah kepada PLN.

Kedelapan, kerjasama dengan PT. Anak Gresik Raya (AGR) berupa kegiatan Pengelolaan Pupuk Organik.

Kesembilan, kerjasama dengan Perkumpulan Untuk Peningkatan Usaha Kecil (PUPUK) berupa kegiatan Pengembangan sistem pelayanan perizinan terpadu secara partisipatif.

C. Koordinasi dengan intansi vertikal di daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di era Otonomi Daerah, fungsi koordinasi dengan instansi vertikal tetap sangat diperlukan dan mempunyai kedudukan yang sangat strategis utamanya terkait dengan fungsi – fungsi dan kebijakan antara perangkat Pemerintah Pusat di Tingkat Pusat dengan perangkat Daerah, antara perangkat

pemerintah Pusat dengan perangkat Pemerintah Pusat di daerah atau antara perangkat Pemerintah Pusat di Daerah dengan perangkat Daerah Otonom(Dinas, dan lain –lain).

Untuk menghindari adanya berbedaan yang mungkin dapat menimbulkan perbedaan strategi penerapan suatu Peraturan Perundang–undangan maka di Kabupaten Lamongan menetapkan program dan kegiatan dalam rangka fungsi koordinasi antara instansi Vertikal adalah Kordinasi dengan instansi Vertikal di Kabupaten Lamongan berupa : Rapat Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA) yang dilaksanakan secara rutin pada setiap bulan dan secara Insidental disesuaikan dengan kebutuhan dalam rangka membahas suatu permasalahan dan mencari solusinya hal ini untuk menciptakan situasi dan kondisi daerah agar tetap mantap, aman dan kondusip

D. Terjadinya bencana alam tidak bisa diduga sebelumnya karena kita percaya bahwa qodo dan qodar hanya dari pada-Nya namun demikian nasib suatu bangsa tidak akan berubah jika kita sendiri tidak berupaya melakukan sesuatu perubahan, untuk menyikapi hal tersebut kita harus selalu berupaya agar bencana yang sebelumnya secara rutin terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, alhamdulillah beberapa tahun terakhir sudah dapat dieliminir sehingga pada daerah-daerah tertentu yang dulunya menjadi daerah genangan dan

langganan banjir sekarang justru menjadi lahan yang dapat dimanfaatkan.

Untuk melaksanakan pencegahan dan penanggulangan bencana Pemerintah Kabupaten Lamongan telah melakukan kebijakan melalui program pengendalian bencana banjir dengan kegiatan penanggulangan bencana alam.

E. Pengelolaan Kawasan Khusus,pada bulan Desember 2003, PT Lamongan Wira Jatim yang merupakan suatu Badan Usaha milik Pemerintah Kabupaten Lamongan dan Pemerintah Propinsi Jatim telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan Eastlog Holding Pte Ltd Singapore untuk membentuk perusahaan patungan (Joint Venture company) yang kemudian dinamakan PT. Lamongan Integrated Shorebase (LIS) dengan komposisi saham 55 persen PT Lamongan Wira Jatim dan 45 persen Eastlog Holding Pte Ltd Singapore. Adapun kewajiban utama PT Lamongan Wira Jatim menyediakan lahan 140 hektare dan semua perijinan, sedangkan dana modal dasar dan dana operasional perusahaan patungan dipinjami secara komersial oleh Eastlog Holding Pte Ltd Singapore. Namun sejak bulan Desember 2005 dilakukan restrukturisasi total yang bertujuan untuk menjadikan PT LIS sebagai suatu BUMD penuh sehingga memenuhi segala persyaratan perijinan yang sudah diberikan termasuk ijin lokasi pembangunan pelabuhan Lamongan Shorebase yang telah diperkuat dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Lamongan pada awal bulan Januari 2007 yang menyatakan kepemilikan PemKab Lamongan dalam PT Lamongan Integrated Shorebase.

Dalam suatu mega proyek seperti Lamongan Shorebase ini, PT LIS sejak awalnya menyadari bahwa pasti akan timbul hambatan dan tantangan, hambatan utama adalah penyediaan lahan yang merupakan kewajiban Pemkab Lamongan dan Pemprov Jatim sebagai pemegang saham. Meskipun sudah dilakukan pendekatan secara musyawarah mufakat, seringkali pemilik lahan di tunggangi oleh provokator yang menimbulkan harga yang tidak terkendali.

Pembangunan Wisata Bahari Lamongan (WBL) yang berdiri pada tanggal 14 Nopember 2004 sebagai penyeimbang terhadap wahana wisata yang telah ada sebelumnya, yaitu Tanjung Kodok dan Goa Maharani, terletak dipesisir bagian utara P. Jawa tepatnya di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Propinsi Jawa Timur. Dilengkapi dengan fasilitas hotel dan villa, Wisata Bahari Lamongan (WBL). Berdiri diatas tanah seluas 17 Ha.

Permasalahan dan hambatan yang timbul dalam pembangunan Wisata Bahari Lamongan antara lain Jalan kurang lebar dan banyak jalan yang rusak (bergelombang) mulai dari Manyar ke WBL, dimana jalan tersebut adalah jalan propinsi sehingga kewenangan ada di Pemerintah Propinsi Jatim.

F. Dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai antisipasi akan terjadinya konflik yang berbasis SARA, anarkis, separatisme atau lainnya telah dilaksanakan Program Pengelolaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Daerah melalui kegiatan Sosialisasi dan Jaringan Komunikasi HAM; Penyelesaian masalah Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM); Program Fasilitas Kehidupan Politik dan Pemberdayaan LSM melalui kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan, Pembinaan Daerah Rawan Konflik; Pembinaan Politik dalam Negeri; Monitoring Kegiatan Poleksosbud; Pembinaan Forum Fasilitasi, Komunikasi dan Konsultasi LSM , Ormas dan Orpol; serta fasilitasi Bakom PKB dan Tehnik Pemantauan Orang Asing.

BAB VII

PENUTUP

BAB VII

PENUTUP

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT,

Demikian pengantar dan executive summary Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2006 yang berupa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan serta Pertanggungjawaban APBD Tahun 2006 dalam bentuk Kebijakan Umum Keuangan Daerah yang memuat kebijakan pendapatan dan belanja.

Secara umum tingkat capaian kinerja pada tahun anggaran 2006 telah mencukupi target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 02 Tahun 2006 tentang RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2006-2010.

Adapun laporan selengkapnya termasuk di dalamnya Laporan Capaian Kinerja berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2006-2010, terdapat pada Buku II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan yang Saya sampaikan saat ini.

Saya menyadari bahwa apa yang telah dicapai pada Tahun 2006 masih belum sepenuhnya memenuhi harapan dan dambaan masyarakat Lamongan, yang telah memberikan amanat kepada Saya untuk memimpin

Lamongan pada periode yang kedua, untuk itu Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Dan kepada para anggota Dewan, Instansi TNI dan POLRI, perangkat Daerah, Lembaga-lembaga swadaya masyarakat, para ulama dan tokoh masyarakat serta seluruh masyarakat, yang telah memberikan dukungan terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, dengan segala kerendahan hati Saya menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Akhirnya dengan mengucap Alhamdulillahhirobbil'alamin semoga Allah Subhaanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan petunjuk, kepada kita sekalian.

Sekian terima kasih,

Wassalamu'alaikum Warohmatulloh Wabarokatuh.

BUPATI LAMONGAN

H. MASFUK, SH

LAMPIRAN I
CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN RPJMD 2006-2010

PROGRAM, TOLOK UKUR KINERJA, TARGET KINERJA RPJMD DAN CAPAIAN TARGET KINERJA SKPD

No.	Program	Tolok Ukur Kinerja (Indikator sasaran RPJM)		Target RPJM Tahun 2006 (%)	Capaian Target	SKPD
1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Sistem Administrasi Pemerintahan	1.1	Perbandingan Jumlah SKPD terhadap kebutuhan	100	100	Bagian Organisasi
		1.2	% SKPD yang hasil analisa jabatan dan ketatalaksanaannya telah	19,25	16	Bagian Organisasi
		1,3	% SKPD yang memiliki Renstra dan menyusun LAKIP.	100	100	Bagian Organisasi
		1,4	% SKPD yang miliki tata kearsipan yang baik	31,94	100	Arsip dan Perpus
		1.5	% SKPD pengelola arsip bernilai historis tingggi dan vital	30	100	Arsip dan Perpus
		1.6	% dokumen kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	99,16	99,95	BKD
2	Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah dan Aset Daerah	2,1	Kecepatan rata-rata penyelesaian SPM	100	100	BKBD
		2,2	% SKPD yang menyampaikan SPJ tepat waktu	51,72	60	BKBD
		2,3	Kecepatan dalam meneliti RASK dan DASK.	100	100	BKBD
		2,4	Kecepatan penerbitan SKO.	100	100	BKBD
		2,5	% Laporan Keuangan dan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan telah dilaksanakan sesuai ketentuan.	90	90	BKBD
		2,6	% Laporan Keuangan dan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan terlakana sesuai penerapan UU. No. 1/2004	50	80	BKBD
		2,7	Peningkatan penggunaan Stan-dard Analisis Belanja (SAB) dalam	90	90	BKBD
		2,8	Ketepatan penilaian aset daerah.			
			- SKPD yang telah melaporakan tepat waktu	53,92	61,27	BKBD
			- Tersusunnya sistem informasi aset-aset daerah	90	60	BKBD
		2,9	% peningkatan pajak daerah	1,12	6,34	Dinas Pendapatan
		2,10	% peningkatan retribusi daerah	-0,18	2,63	Dinas Pendapatan
3	Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Pemerintah	3,1	% Kasus hukum yang diselesaikan	25	65	Bagian Hukum
		3,2	% Raperda yang diajukan ke DPRD	100	100	Bagian Hukum
		3,3	% Penurunan jumlah kasus berindikasi TPK	0	0	Bawasda
		3,4	% Penurunan PNS yang dikenakan sanksi dan hukuman	80	100	Bawasda
		3,5	% Penurunan kasus pelanggaran hukum oleh aparatur pemkab	80	100	Bawasda
		3,6	% Tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	100	100	Bawasda
		3,7	% Realisasi pelaksanaan pemeriksaan PKPT, Insidentil, Wasbangda, Pelayanan Publik dan Audit akhir tahun anggaran.	92,25	92,25	Bawasda

No.	Program	Tolok Ukur Kinerja (Indikator sasaran RPJM)		Target RPJM Tahun 2008 (%)	Capaian Target	SKPD
4	Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan	4.1	% Penelitian yang ditindaklanjuti	100	100	Bappeda
		4.2	% Dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu	80	80	Bappeda
		4.3	% peningkatan jumlah DASK yang diselesaikan tepat waktu.	62.5	80	Bagian Pembangunan
		4.4	% kegiatan yang sesuai waktu dan mutu yang direncanakan	97.3	95	Bagian Pembangunan
5	Pengelolaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah	5.1	% Pegawai yang mengikuti Diklat Struktural	100	100	BKD
		5.2	% Pegawai yang mengikuti Diklat Fungsional	100	100	BKD
		5.3	% Pegawai yang mengikuti Diklat Teknis	100	100	BKD
		5.4	Terpenuhinya formasi CPNSD	100	100	BKD
6	Pengelolaan Kependudukan dan Catatan Sipil	6.1	% KTP yang diselesaikan dalam jangka waktu 1 hari	100	103.03	Kantor Capilduk
		6.2	% Akte kelahiran yang di-selesaikan dalam jangkagka waktu 1 hari	100	142.4	Kantor Capilduk
		6.3	% penduduk ber KTP	69.5	86.03	Kantor Capilduk
		6.4	% penduduk ber Akte	40.72	40.8	Kantor Capilduk
7	Peningkatan Kualitas Perijinan	7.1	% Instansi pelayanan yang memperoleh ISO	22.22	22.22	Bagian Organisasi
		7.2	% SKPD yang memiliki SPM	PM	80/16 SKPD	Bagian Organisasi
		7.3	Rata-rata tenggang waktu penyelesaian IMB	93	81	Kantor Perizinan
		7.4	Rata-rata tenggang waktu penyelesaian izin usaha/SIUP	96.8	96.9	Kantor Perizinan
		7.5	% Layanan publik yang menggunakan teknologi informasi (IT)	6.00	7.00	Kantor PDE
		7.6	% Peningkatan jumlah pengunjung Situs resmi Pemkab Lamongan.	20	80	Kantor PDE
		7.7	% Keluhan masyarakat yang ditanggapi	100	100	Kantor Infokom
8	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	8.1	% peningkatan kuantitas sarana prasarana aparatur.	PM	95.17	BKBD
		8.2	% peningkatan kualitas sarana prasarana aparatur.	PM	100	BKBD
9	Peningkatan Kualitas Informasi dan Saluran Aspirasi Masyarakat	9.1	% peningkatan ketersediaan sarana penyaluran aspirasi masyarakat	80	81.1	Kantor Infokom
		9.2	% Aspirasi masyarakat yang ditindak lanjuti	100	100	Setwan
10	Peningkatan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat	10.1	% Raperda yang diselesaikan menjadi Perda	100	100	Setwan
11	Pengembangan Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan	11.1	% Peningkatan Produksi Tanaman (Bahan makanan)			
			Tanaman Pangan			
			a) Padi	1.30	9.82	Distanhut
			b) Jagung	0.68	21.35	Distanhut
			c) Kedelai	4.00	-1.44	Distanhut
			d) Kacang tanah	26.2	-8.75	Distanhut
			e) Kacang hijau	10.1	-0.44	Distanhut
			f) Ubi Kayu	3.00	-12.24	Distanhut

No.	Program	Tolok Ukur Kinerja (Indikator sasaran RPJM)		Target RPJM Tahun 2006 (%)	Capaian Target	SKPD
			Tanaman Hortikultura			
			a) Blimbing	3.00	-39	Distanhut
			b) Mangga	3.20	45.5	Distanhut
			c) Nangka	3.20	5.9	Distanhut
			d) Pisang	3.20	35.24	Distanhut
			e) Sukun	3.20	-26.72	Distanhut
			f) Melon	3.20	4.52	Distanhut
			g) Semangka	3.20	11.84	Distanhut
			h) Lombok Kecil	3.20	-3.04	Distanhut
		11.2	% Peningkatan Produktifitas Tanaman (Bahan makanan)			
			Tanaman Pangan			
			a) Padi	1.00	3.70	Distanhut
			b) Jagung	1.00	20.83	Distanhut
			c) Kedelai	2.50	-3.99	Distanhut
			d) Kacang tanah	2.50	2.51	Distanhut
			e) Kacang hijau	8.00	7.04	Distanhut
			f) Ubi Kayu	1.00	3.38	Distanhut
			Tanaman Hortikultura			
			a) Blimbing	1.60	-4.03	Distanhut
			b) Mangga	1.60	5.37	Distanhut
			c) Nangka	1.60	0.26	Distanhut
			d) Pisang	1.60	54.44	Distanhut
			e) Sukun	1.60	0.06	Distanhut
			f) Melon	1.60	35.41	Distanhut
			g) Semangka	1.60	5.28	Distanhut
			h) Lombok Kecil	1.60	1.51	Distanhut
		11.3	Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan			
			* Produksi			
			a) Tembakau virginia	1.60	161.6	Distanhut
			b) Tembakau jawa	1.60	175.49	Distanhut
			c) Kapas	1.60	-75.44	Distanhut
			d) Tebu	1.60	31.27	Distanhut
			d) Kenaf	1.60	-5.97	Distanhut

No.	Program	Tolok Ukur Kinerja (Indikator sasaran RPJM)		Target RPJM Tahun 2006 (%)	Capaian Target	SKPD
			* Produktivitas			
			a) Tembakau virginia	1.60	63.19	Distanhut
			b) Tembakau jawa	1.60	23.38	Distanhut
			c) Kapas	1.60	-64.48	Distanhut
			d) Tebu	1.60	1.98	Distanhut
			e) Kenaf	1.60	-18.62	Distanhut
		11.4	% peningkatan Produksi hasil ternak			
			- Ternak besar	4.00	1.17	Distanhut
			- Ternak Kecil	2.00	0.85	Distanhut
			- Unggas	4.00	-7.33	Distanhut
		11.5	% peningkatan Produksi hasil Kehutanan/ hutan rakyat	-0.60	-11.48	Distanhut
		11.6	% peningkatan Produksi Perikanan			
			a) Perikanan laut/tangkap	0.50	-0,84	Dinas PKP
			b) Perairan Umum	0.20	-3,81	Dinas PKP
			c) Budidaya :			
			* Tambak	0.50	0.50	Dinas PKP
			* Sawah Tambak	1.00	-7,55	Dinas PKP
			* Kolam	0.20	-1,65	Dinas PKP
12	Pengembangan Industri, Perdagangan dan Pari-wisata	12.1	% peningkatan PDRB sektor industri	0.05	12.89	Dinas Perindagkop
		12.2	% peningkatan PDRB sub sektor perdagangan	0.08	19.53	Dinas Perindagkop
		12.3	% peningkatan PDRB sub sektor hiburan & rekreasi (pariwisata)	0.05	12.25	Dinas Perhubpar
		12.4	% peningkatan kunjungan wisatawan			
			a) Wisatawan Mancanegara	100	100.5	Dinas Perhubpar
			b) Wisatawan Nusantara	3.00	3.00	Dinas Perhubpar
13	Peningkatan Investasi dan Iklim Investasi	13.1	% peningkatan Investasi Daerah	2.78	111.5	Bagian Perekonomian dan Kantor Perijinan
14	Pemberdayaan UMKM dan Koperasi	14.1	% peningkatan kerjasama (MOU) antara UMKM dengan Pengusaha besar	100	100	Dinas Perindagkop
		14.2	% koperasi kualifikasi sehat	43	43.43	Dinas Perindagkop
		14.3	% UMKM tangguh	0.28	0.29	Dinas Perindagkop
		14.4	% UMKM mandiri	0.06	0.07	Dinas Perindagkop
15	Pengembangan Ketenaga-kerjaan	15.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	84	95.76	Kantor Nakertrans
		15.2	% Peningkatan TKI ke luar negeri	12.26	7.21	Kantor Nakertrans
		15.3	% Penurunan kecelakaan kerja	11.54	96.15	Kantor Nakertrans
		15.4	% Sengketa kasus tenaga kerja yang dapat diselesaikan	100	100	Kantor Nakertrans
		15.5	% Peningkatan UMR	100	133.11	Kantor Nakertrans

No.	Program	Tolok Ukur Kinerja (Indikator sasaran RPJM)		Target RPJM Tahun 2006 (%)	Capaian Target	SKPD
16	Program Upaya Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	16.1	Angka Harapan Hidup (IPM)	70.1	74.05	Dinas Kesehatan
		16.2	% balita dengan gizi buruk	0.85	0.84	Dinas Kesehatan
		16.3	% kecamatan rawan gizi	14.29	11	Dinas Kesehatan
		16.4	% prevalensi GAKY	10.6	10.52	Dinas Kesehatan
		16.5	Angka kematian bayi perinatal (0-7 hr) per 1000 kelahiran hidup	3,90 %o	2,15 %o	Dinas Kesehatan
		16.6	Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	92 %ooo	71,93 %ooo	Dinas Kesehatan
		16.7	Angka AFP pada anak usia < 15 tahun per 100.000 anak	2	2	Dinas Kesehatan
		16.8	Angka kesakitan TB Paru	72.14	82	Dinas Kesehatan
		16.9	Angka kesaktian DBD	20.482	22.22	Dinas Kesehatan
		16.10	% penduduk yang memanfaatkan Puskesmas dan Rumah sakit	53.51	57.56	Dinas Kesehatan
		16.11	% KLB yang ditangani	100	100	Dinas Kesehatan
		16.12	% Anak sekolah yang mendapatkan layanan kesehatan	65	66	Dinas Kesehatan
		16.13	% penduduk miskin yang terjangkau dalam Jaring Pengaman Kesehatan Masyarakat (JPKM)	100	100	Dinas Kesehatan
		16.14	% pekerja yang mendapatkan layanan kesehatan	100	99.8	Dinas Kesehatan
		16.15	% Posyandu Purnama	37.59	40	Dinas Kesehatan
			% Posyandu Mandiri	9.06	10	Dinas Kesehatan
17	Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit	17.1	% Rumah Tangga Sehat	40	40	Dinas Kesehatan
		17.2	% Tempat-tempat Umum sehat	75	55	Dinas Kesehatan
		17.3	% kelurahan cakupan imunisasi (UCI)	95.78	94.8	Dinas Kesehatan
		17.4	% Penanganan kasus HIV	100	100	Dinas Kesehatan
		17.5	% PUS yang menjadi peserta KB Aktif	79.15	80.4	Dinas Kesehatan
		17.6	% Institusi pelayanan kesehatan yang memiliki sarana sesuai standar	84.29	85	Dinas Kesehatan
		17.7	% Sarana kesehatan yang beroperasi sesuai dengan standar	100	100	Dinas Kesehatan
		17.8	Rasio tenaga dokter (ideal 1 : 30.000 jumlah penduduk)	29,881	25,383	Dinas Kesehatan
		17.9	Rasio tenaga Bidan (ideal 1 : 5.000 jumlah penduduk)	8,803	3,026	Dinas Kesehatan
		17.10	Rasio tenaga dokter (ideal 1 : 5.000 jumlah penduduk)	5,085	5,015	Dinas Kesehatan
		17.11	% Tenaga medis yang memenuhi syarat	84.46	84.46	Dinas Kesehatan
		17.12	% penyediaan obat esensial generik atas persediaan obat di sarana kesehatan pemerintah	44.38	20	Dinas Kesehatan
		17.14	% Rumah Sakit yang menyediakan 4 layanan kesehatan spesialis dasar	100	75	Dinas Kesehatan
18	Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial	18.1	% penurunan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial	6.16	6.87	Dinas KB dan Kessos
		18.2	% Pertumbuhan penduduk (data BPS)	0.91	0.97	Dinas KB dan Kessos
19	Program Penanggulangan Kemiskinan	19.1	% penurunan jumlah penduduk miskin	27.8	31.82	Dinas KB dan Kessos
		19.2	% warga miskin yang meningkat pendapatannya	5.7	7.66	Dinas KB dan Kessos
		19.3	% warga miskin yang meningkat kualitas lingkungan hidup, permukiman dan perumahannya	0.42	0.51	Dinas KB dan Kessos

No.	Program	Tolok Ukur Kinerja (Indikator sasaran RPJM)		Target RPJM Tahun 2008 (%)	Capaian Target	SKPD
20	Peningkatan Kualitas Pendidikan	20.1	Rasio guru per siswa (perjenjang sekolah)			
			a). SD/MI	13.33	11	Dinas P dan K
			b). SMP/MTS	10.93	10	Dinas P dan K
			c). SMA/MA/SMK	9.1	9	Dinas P dan K
						Dinas P dan K
		20.2	Persentase guru sesuai kualifikasi			
			a). SD/MI	87.82	87.82	Dinas P dan K
			b). SMP/MTS	87.75	87.75	Dinas P dan K
			c). SMA/MA/SMK	87.57	87.57	Dinas P dan K
						Dinas P dan K
		20.3	Persentase Sekolah yang Menerapkan Kurikulum Berbasis kompetensi (perjenjang sekolah)			
			a). SD/MI	100	100	Dinas P dan K
			b). SMP/MTS	100	100	Dinas P dan K
			c). SMA/MA/SMK	100	100	Dinas P dan K
				100	100	Dinas P dan K
		20.4	Angka Kelulusan			
			a). SD/MI	100	99.99	Dinas P dan K
			b). SMP/MTS	99.07	99.63	Dinas P dan K
			c). SMA/MA/SMK	99.21	99.68	Dinas P dan K
						Dinas P dan K
		20.5	Rata-rata nilai kelulusan siswa NEM			
			a). SD/MI	8	8	Dinas P dan K
			b). SMP/MTS	7.49	7.49	Dinas P dan K
			c). SMA/MA	8.01	8.01	Dinas P dan K
			d). SMK	7.78	7.78	Dinas P dan K
		20.6	Rata-rata lama sekolah (IPM)			
			a). SD/MI	6 Th	6 Th	Dinas P dan K
			b). SMP/MTS	3 Th	3 Th	Dinas P dan K
			c). SMA/MA	3 Th	3 Th	Dinas P dan K
			d). SMK	3 Th	3 Th	Dinas P dan K
		20.7	Meningkatnya minat baca masyarakat	76.61	76.61	Dinas P dan K

No.	Program		Tolok Ukur Kinerja (Indikator sasaran RPJM)	Target RPJM Tahun 2006 (%)	Capaian Target	SKPD
21	Program Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan	21.1	APM			
			a). SD/MI	99.88	99.88	Dinas P dan K
			b). SMP/MTS	76.25	84.69	Dinas P dan K
			c). SMA/MA/SMK	46.26	53.3	Dinas P dan K
						Dinas P dan K
		21.2	APK			
			a). SD/MI	106.19	117.34	Dinas P dan K
			b). SMP/MTS	99.21	110.65	Dinas P dan K
			c). SMA/MA/SMK	59.7	74.54	Dinas P dan K
						Dinas P dan K
		21.3	Persentase Anak tidak mampu yang bersekolah (SMU) yang dibantu	20.61	20.61	Dinas P dan K
		21.4	Angka Putus Sekolah			
			a). SD/MI	0.09	0.17	Dinas P dan K
			b). SMP/MTS	1.1	1.23	Dinas P dan K
			c). SMA/MA/SMK	1.4	1.07	Dinas P dan K
						Dinas P dan K
		21.5	Angka Melek Huruf (IPM)	2,867	3,060	Dinas P dan K
22	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan	22.1	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan			
			a) Ruang Kelas SD/MI	92.38	93.71	Dinas P dan K
			b) Non Ruang Kelas SD/MI	PM		Dinas P dan K
			a) Ruang Kelas SMP/MTS	94.29	98.3	Dinas P dan K
			b) Non Ruang Kelas SMP/MTS	PM		Dinas P dan K
			a) Ruang Kelas SMA/MA/SMK	100	117	Dinas P dan K
			b) Non Ruang Kelas SMA/MA/SMK	PM		Dinas P dan K
		22.2	Persentase Ketersediaan sarana perpustakaan			Dinas P dan K
23	Program Pengembangan Olah Raga dan Kepemudaan	23.1	Persentase organisasi pemuda yang dibina	100	100	Dinas P dan K
		23.2	Persentase Pemuda yang berprestasi (berbagai bidang)	0.1	0.1	Dinas P dan K
		23.3	Persentase Prestasi Olah Raga	0.2	0.2	Dinas P dan K
24	Program Pengembangan Kebudayaan	24.1	Persentase cagar budaya yang dilindungi.	23	23	Dinas P dan K
		24.2	% peningkatan kelompok seni dan budaya berprestasi	26	26	Dinas P dan K
		24.3	% peningkatan pembinaan Kelompok seni dan budaya	11.64	11.64	Dinas P dan K
25	Program Pengelolaan Jalan dan Jembatan	25.1	% peningkatan infrastruktur jalan kondisi baik	80	71.57	DPU Bina Marga
			% peningkatan infrastruktur jembatan kondisi baik	57.63	57.63	DPU Bina Marga

No.	Program		Tolok Ukur Kinerja (Indikator sasaran RPJM)	Target RPJM Tahun 2006 (%)	Capaian Target	SKPD
26	Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan lainnya	26.1	% Ketersediaan Sumber air baku (M3)	65.38	66.34	DPU Pengairan
		26.2	% ketersediaan jaringan irigasi	91.5	91.24	DPU Pengairan
		26.3	% Peningkatan jaringan irigasi berkondisi baik	53	51.36	DPU Pengairan
27	Program Peningkatan kualitas pemukiman dan lingkungan pemukiman	27.1	% peningkatan pelayanan air bersih	35.28	33.2	DPU Cipta Karya
		27.2	% Terpenuhinya kebutuhan jalan lingkungan	35	74.61	DPU Cipta Karya
		27.3	% Ketersediaan drainase	35	41.26	DPU Cipta Karya
		27.4	% ketersediaan PJU	99.75	112.69	DPU Cipta Karya
28	Program Pengembangan Potensi Kawasan	28.1	% Penyelesaian pembangunan LIS (Lamongan Integrated Shore Base)	25	90	Bappeda, BKBD, DPU Cipta Karya, DPU Bina Marga
		28.2	% Terpenuhinya sarana penunjang zona kawasan WBL (Wisata Bahari Lamongan).	90	90	DPU Cipta Karya
		28.3	% Penyelesaian pembangunan dermaga penyeberangan antar pulau (ASDP)	50	40	Dinas Perhubpar
		28.4	% ketersediaan sarana komuter dari Lamongan - Gresik- surabaya	0%	50	Dinas Perhubpar
29	Program Pengembangan Transporatasi	29.1	% Penyelesaian Pelabuhan khusus reklamasi nusantara	100	50	Dinas Perhubpar
		29.2	% Penyelesaian Pelabuhan Umum Sedayu Lawas.	60	60	Dinas Perhubpar
		29.3	% Penyelesaian terminal terpadu di kawasan ASDP.	50	30	Dinas Perhubpar
		29.4	% peningkatan ketersediaan rambu lalu lintas	10	52.4	Dinas Perhubpar
		29.5	% peningkatan ketersediaan marka jalan	60	74	Dinas Perhubpar
		29.6	% peningkatan ketersediaan APILL (Alat pemantau instalasi lalu lintas)	60	60	Dinas Perhubpar
		29.7	% peningkatan kendaraan yang telah uji kir.	91.99	97.2	Dinas Perhubpar
		29.8	% penurunan jumlah pelanggaran lalu lintas	10	3	Dinas Perhubpar
		29.9	% penurunan jumlah kecelakaan lalu lintas	7	7	Dinas Perhubpar
		29.10	% peningkatan kapal yang telah memiliki Pas dan SKK.	38	9.2	Dinas Perhubpar
		29.11	% peningkatan kapal yang telah ber register	80	80	Dinas Perhubpar
		29.12	Terwujudnya prototype kapal	0	0	Dinas Perhubpar
30	Program Pengendalian dan Pelestarian Lingkungan	30.1	% Jumlah hari dengan kualitas udara baik dalam setahun	100	100	Bagian Ling. Hidup
		30.2	% peningkatan rata-rata baku mutu kualitas (kadar Ph dan DO) air sungai dan air tanah di Lamongan	4/4	100	Bagian Ling. Hidup
						Bagian Ling. Hidup
		30.3	% Peningkatan kelestarian kawasan pesisir pantai	61.75	61.75	Bagian Ling. Hidup
		30.4	% Penurunan Luas areal lahan kritis	3.376/15.880	3.510,87/15.880	Bagian Ling. Hidup
		30.5	% Peningkatan ketaatan terhadap dokumen AMDAL atau UKL/UPL	100	100	Bagian Ling. Hidup
		30.6	% Peningkatan Perusahaan yang menggunakan IPAL	100	100	Bagian Ling. Hidup
		30.7	% Penurunan Kawasan kumuh	-	10.87	DPU Cipta Karya

No.	Program	Tolok Ukur Kinerja (Indikator sasaran RPJM)		Target RPJM Tahun 2006 (%)	Capaian Target	SKPD
31	Program Penataan dan Pengendalian tata Ruang	31.1	% penurunan penyimpangan pemanfaatan lahan	-	100	DPU Cipta Karya
		31.2	% bangunan ber IMB	-	12.61	DPU Cipta Karya
		31.3	% Penurunan penyimpangan pemanfaatan lahan tambang.	12	12	Bagian Perekonomian
32	Program Peningkatan Kebersihan Lingkungan	32.1	% Ruas jalan kota yang dibersihkan.	-	64	DPU Cipta Karya
		32.2	% meningkatnya volume sampah yang diangkut dari TPS ke TPA	75	74.69	DPU Cipta Karya
		32.3	% Lahan terbuka hijau	-	74	Distanhut dan Bagian LH
33	Program Pengendalian Banjir	33.1	% penurunan luas area genangan	6 Ha	6,12 Ha	DPU Pengairan
		33.2	% penurunan lamanya waktu genangan air	6 Bln	6,1 Ha	DPU Pengairan
		33.3	% penurunan tinggi genangan	6 Mtr	6,7 Ha	DPU Pengairan
34	Program Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman masyarakat	34.1	% Penurunan pelanggaran Peraturan Daerah			
			1) Pelanggaran Ijin usaha	86.96	107	Kantor Sat Pol PP
			2) Pelanggaran Miras	96.15	119.23	Kantor Sat Pol PP
			3) Pelanggaran PKL	94.59	162.16	Kantor Sat Pol PP
			4) Pelanggaran WTS	89.55	102.9	Kantor Sat Pol PP
			5) Pelanggaran IMB	91.67	121.67	Kantor Sat Pol PP
			6) Pelanggaran Reklame	94.07	154.69	Kantor Sat Pol PP
35	Program Fasilitasi Kehidupan Politik dan Pemberdayaan Lembaga Swadaya Masyarakat	35.1	Persentase organisasi masyarakat, orpol, pemuda, organisasi kemasyarakatan yang dibina	55	76.44	Bakesbang Linmas
		35.2	Persentase aspirasi yang ditindak lanjuti	0.7	0.7	Bakesbang Linmas
		35.3	Persentase keputusan publik tentang penyelesaian sosial kemasyarakatan yang melibatkan masyarakat.	0.65	0.65	Bakesbang Linmas
		35.4	%penurunan daerah rawan konflik	69.67	69.67	Bakesbang Linmas
36	Program Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama	36.1	Persentase Peningkatan penyelenggaraan Forum Antar Kelompok Masyarakat	17	17	Bakesbang Linmas
		36.2	Persentase pembangunan tempat peribadatan yang dibantu	83	85	Bagian Kesmas
		36.3	% kegiatan keagamaan yang dibantu	250	250	Bagian Kesmas